

ANALISIS KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Rati Melda Sari

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: ratimeldasari@gmail.com

Abstrak

Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas siswa yang dikembangkan dengan cara membebaskan siswa dari ketidaktahuan dan ketidakmampuan. Dengan adanya pendidikan yang bermutu maka akan terlahir generasi atau sumber daya manusia yang unggul dalam segala aspek kehidupan. Banyak kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, seperti kebijakan merdeka belajar. Institusi pendidikan juga tidak kalah tertinggal dalam peningkatan mutu pendidikan yaitu dengan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas pembelajarannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, dimana penelitian deskriptif dalam hal ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kebijakan merdeka belajar sebagai usaha meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan sumber yang diambil yaitu dari buku-buku ilmiah yang sudah diterbitkan dengan maksud untuk dijadikan sebagai bahan referensi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplementasian kebijakan merdeka belajar dapat dilakukan dengan belalui peningkatan mutu pendidikan, proses pembelajaran, komitmen dari guru, dukungan dari kepala sekolah, dan kurikulum pendidikan.

Kata kunci: *Kebijakan Merdeka Belajar, Mutu Pendidikan*

PENDAHULUAN

Pembelajaran pada abad 21 menuntut pencapaian keterampilan pada peserta didik (Bashori, 2016). Pencapaian ini tentunya dapat diwujudkan melalui proses perencanaan pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang berbasis kepada keterampilan tersebut. Kegiatan perencanaan ini tergambar dari perangkat pembelajaran yang digunakan sekolah untuk menyelenggarakan proses pembelajaran di kelas, mulai dari silabus, kurikulum, bahan ajar, media pembelajaran yang digunakan, serta instrumen penilaian yang akan digunakan. Seluruh aspek perangkat pembelajaran ini hendaknya disusun berorientasi pada kebutuhan keterampilan abad 21 yang akan dicapai.

Bentuk perencanaan yang matang yang tertuang dalam perangkat pembelajaran ini menjadi dasar dan panduan dalam menyelenggarakan pembelajaran di kelas sehingga tidak melenceng dari kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kompetensi abad-21 mencakup suatu pengertian yang luas terfokus pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ditekankan pada apa yang dibutuhkan siswa di sekolah, dunia kerja, dan kehidupan mereka (Bamalli, 2013; Chen, 2017) sesuai dengan Revolusi Industri 4.0. Tuntutan pada era revolusi industri 4.0 ini menjadi tugas besar bagi pemerintah khususnya sektor pendidikan (Hendra, 2017). Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan saat ini menjadi prioritas utama agar menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghadapi globalisasi (Baro'ah, 2020). Keterbukaan serta kemajuan

informasi dan teknologi, pendidikan akan semakin dihadapkan dengan berbagai tantangan dan permasalahan yang kompleks.

Menurut Mulyasa (2010) dewasa ini upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia dan pengembangan watak bangsa. Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan dibidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Mutu pendidikan merupakan faktor penting yang harus diwujudkan dalam proses pendidikan.

Salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan ialah membuat kebijakan baru terkait kurikulum. Kurikulum yang saat ini dicanangkan oleh pemerintah khususnya menteri pendidikan adalah kurikulum merdeka belajar. Konsep kurikulum merdeka belajar ini menekankan pada pemberian kebebasan di bidang pendidikan (Faiz dan Kurniawaty, 2020); (Prasetyo, Bashori, & Novi Nur Lailisna, 2020). Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator bagi siswa dalam memberikan pembelajaran (Mualifah, 2013). Untuk itu, pembangunan di sektor pendidikan perlu dirancang agar berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul dapat diatasi. Dunia pendidikan nasional perlu dirancang agar mampu melahirkan generasi yang memiliki keunggulan pada era globalisasi seperti sekarang ini.

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena pendidikan penting bagi bangsa dan negara maka pendidikan harus selalu diusahaka agar berjalan dengan baik. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai medeka belajar sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta pencapaian keterampilan peserta didik.

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam substansi kebijakan merdeka belajar sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan.

KAJIAN TEORI

1. Kebijakan Merdeka Belajar

a. Analisis Defenisi Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan suatu prosedur berfikir yang sudah lama dikenal dan dilakukan dalam sejarah manusia. Kata kebijakan (Hasbullah, 2015) adalah terjemahan dari kata “*policy*” dalam bahasa inggris yang berarti mengurus masalah atau kepentingan umum, disandingkan dengan pendidikan maka merupakan hasil terjemahan dari kata *educational policy* yang berasal dari 2 kata, sehingga Hasbulah mengatakan kebijakan pendidikan memiliki arti yang sama dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Menurut Duncan MacRae (1976) analisis kebijakan adalah sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahakan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik (Suryadi, dan Tilaar, 1994). Lebih lanjut Suryadi dan Tilaar menegaskan bahwa analisis kebijakan adalah sebagai suatu cara atau prosedur dalam menggunakan pemahaman manusia terhadap dan untuk pemecahan (Suyahman, 2016), jadi penulis merumuskan bahwa analisis kebijakan adalah suatu proses evaluasi kebijakan untuk tujuan tertentu.

b. Merdeka Belajar

Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud RI) yang dicanangkan oleh Mendikbud Nadiem Anwar Makarim. Nadiem membuat kebijakan merdeka belajar bukan tanpa alasan. Pasalnya, penelitian Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2019 menunjukkan hasil penilaian pada peserta didik Indonesia hanya menduduki posisi keenam dari bawah; untuk bidang matematika dan literasi, Indonesia menduduki posisi ke-74 dari 79 Negara. Menyikapi hal itu, Nadiem pun membuat gebrakan penilaian dalam kemampuan minimum, meliputi literasi, numerasi, dan survei karakter. Literasi bukan hanya mengukur kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menganalisis isi bacaan beserta memahami konsep di baliknya.

Untuk kemampuan numerasi, yang dinilai bukan pelajaran matematika, tetapi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep numerik dalam kehidupan nyata. Satu aspek sisanya, yakni Survei Karakter, bukanlah sebuah tes, melainkan pencarian sejauh mana penerapan nilai-nilai budi pekerti, agama, dan Pancasila yang telah dipraktekkan oleh peserta didik.(Siti Mustaghfiro, 2020). Esensi kemerdekaan berpikir, menurut Nadiem, harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkannya pada peserta didik. Nadiem menyebut, dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi.

Ada empat pokok kebijakan baru Kemendikbud RI (Kemendikbud, 2019: 1-5), yaitu: 1) Ujian Nasional (UN) akan digantikan oleh Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen ini menekankan kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi lembaga pendidikan untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya (Kemendikbud, 2019: 1); 2) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan kemerdekaan dalam menentukan bentuk penilaian, seperti portofolio, karya tulis, atau bentuk penugasan lainnya(Kemendikbud, 2019); 3) Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat satu halaman saja. Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru yang tersita untuk proses pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi (Kemendikbud, 2019); 4) Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), sistem zonasi diperluas (tidak termasuk daerah 3T. Bagi peserta didik yang melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini (Kemendikbud, 2019).

2. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan

Pendidikan nasional Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan harapan para peserta didik, pendidik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah itu sendiri, baik dari kualitas maupun kuantitas (Bashori, 2017c). Dari segi kuantitas merujuk pada suatu seberapa besar suatu program pendidikan dapat mencapai sasaran, sedangkan dari segi kualitas mengarah pada nilai dari suatu produk yang dikeluarkan. Dari segi kuantitas jumlah anak yang sekolah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, namun dari segi kualitas dunia pendidikan di Indonesia belum mampu memenuhi tuntutan dunia global. Dan yang paling memprihatinkan akhir-akhir ini kualitas akhlak masyarakat Indonesia semakin jauh dari nilai pancasila. Hal ini dapat terlihat dari sikap anarkisme dari para demonstran yang menyuarakan aspirasinya ,serta maraknya kejahatan yang terjadi.

Strategi peningkatan mutu pendidikan menjadi agenda penting pemerintah (kemendikbud), berbagai terobosan dan kebijakan telah diambil dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang merata dan bermutu. Salah satu program pemerintah yang sekarang adalah kebijakan merdeka belajar. Salah satu ide pokok dari kebijakan merdeka belajar tersebut adalah terfokus pada kemerdekaan sumber daya manusianya. (Siti Baro'ah, 2020) Merdeka dalam arti terbebas dari ketakutan dan terbebas dari tuntutan. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang berlaku secara nasional, dan harus benar-benar direalisasikan pada setiap satuan pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang akan dipakai dalam penelitian ini, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dan dasar teori di manfaatkan sebagai pemandu juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi,

gambaran, atau lukisan secara sistematis, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Jenis metode deskriptif yang dilakukan yaitu penelitian perpustakaan merupakan kegiatan mengamati berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dianggap baik itu berupa buku, makalah ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Menurut Kartini Kartono (1986) dalam buku pengantar metodologi Research Social mengemukakan bahwa tujuan penelitian perpustakaan adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang ada di perpustakaan, hasilnya dijadikan fungsi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian lapangan. Karena menggunakan penelitian perpustakaan berarti sumber data diambil dari berbagai sumber data yang relevan dengan topik yang diangkat yaitu merdeka belajar sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembelajaran

Pembelajaran merupakan kegiatan belajar mengajar yang berperan dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Dari proses pembelajaran akan terjadi hubungan timbal balik antara guru dengan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses pembelajaran hendaknya dirancang agar dapat menumbuhkan motivasi dan mendukung siswa untuk memiliki empat kompetensi yang harus dimiliki oleh generasi bangsa dalam menghadapi abad 21. Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri (Risnita & Bashori, 2020). Melalui pembelajaran akan terjadi proses pengembangan moral keagamaan, aktivitas, dan kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan pengalaman belajar.

Pembelajaran berbeda dengan mengajar yang pada prinsipnya menggambarkan aktivitas guru, sedangkan pembelajaran menggambarkan aktivitas peserta didik. (Abuddin Nata, 2009) Pembelajaran harus menghasilkan belajar pada peserta didik dan harus dilakukan suatu perencanaan yang sistematis, sedangkan mengajar hanya salah satu penerapan strategi pembelajaran diantara strategi-strategi pembelajaran yang lain dengan tujuan utamanya menyampaikan informasi kepada peserta didik. (Evelin Siregar & Hartini Nara, 2012) Kalau diperhatikan, perbedaan kedua istilah ini bukanlah hal yang sepele, tetapi telah menggeser paradigma pendidikan, pendidikan yang semula lebih berorientasi pada “mengajar” (guru yang lebih banyak berperan) telah berpindah kepada konsep “pembelajaran” (merencanakan kegiatan-kegiatan yang orientasinya kepada siswa agar terjadi belajar dalam dirinya).

Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh pihak peserta didik atau murid. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas peserta didik yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru (Syaiful Sagala, 2021) sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran. Beberapa komponen pembelajaran sebagai berikut:

a. Tujuan pembelajaran

Tujuan pembelajaran merupakan titik awal yang sangat penting dalam pembelajaran, sehingga baik arti maupun jenisnya perlu dipahami betul oleh setiap guru maupun calon guru. Tujuan pembelajaran merupakan komponen utama yang harus dirumuskan oleh guru dalam pembelajaran, karena merupakan sasaran dari proses pembelajaran. Mau dibawa ke mana siswa, apa yang harus dimiliki oleh siswa, semuanya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Oleh karenanya, tujuan merupakan komponen pertama dan utama.

b. Materi pembelajaran

Isi atau materi pelajaran merupakan komponen kedua dalam sistem pembelajaran. Dalam konteks tertentu, materi pelajaran merupakan inti dalam proses pembelajaran (Bashori, 2017a). Artinya, sering terjadi dalam proses pembelajaran diartikan sebagai proses penyampaian materi. Hal ini bisa dibenarkan manakala tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pembelajaran (subject centered teaching). Dalam kondisi semacam ini, maka penguasaan materi pelajaran oleh guru mutlak diperlukan (Wina Sanjaya, 2008). Guru perlu memahami secara detail isi materi pelajaran yang harus dikuasai siswa, sebab peran dan tugas guru adalah sebagai sumber belajar. Materi pelajaran tersebut biasanya digambarkan dalam buku teks, sehingga sering terjadi proses pembelajaran adalah menyampaikan materi yang ada dalam buku.

c. Metode Pembelajaran

Metode diartikan sebagai tindakan-tindakan pendidik dalam lingkup peristiwa pendidikan untuk mempengaruhi siswa ke arah pencapaian hasil belajar yang maksimal sebagaimana terangkum dalam tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, metode memegang peranan penting dalam proses pencapaian tujuan pendidikan. Metode pembelajaran adalah cara pembentukan atau pemantapan pengertian peserta didik (penerima informasi) terhadap suatu penyajian informasi/bahan ajar (Daryanto, 2009); (Bashori, 2017b).

d. Sumber Belajar

Menurut AECT (Asosiasi Teknologi Komunikasi Pendidikan) yang mendefinisikan sumber belajar adalah berbagai atau semua sumber baik yang berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi

sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajarnya. Oleh karena itu, sumber belajar adalah semua komponen sistem instruksional baik yang dirancang maupun yang menurut sifatnya dapat dipakai atau dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama untuk membuat atau membantu siswa belajar (Ramayulis, 2012) sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

e. Evaluasi Pembelajaran

Dalam bidang pendidikan, kegiatan evaluasi merupakan kegiatan utama yang tidak dapat ditinggalkan. Begitu juga proses evaluasi pada kegiatan belajar mengajar hampir terjadi setiap saat, tetapi tingkat formalitasnya berbeda-beda. Evaluasi berhubungan erat dengan tujuan instruksional, analisis kebutuhan dan proses belajar mengajar. Tanpa evaluasi suatu sistem instruksional masih dapat dikatakan belum lengkap. Itu sebabnya, evaluasi menempati kedudukan penting dalam rancangan kurikulum dan rancangan pembelajaran.

B. Komitmen Guru

Konsep tentang komitmen guru sangat berdekatan dengan kinerja guru (*teachers' work performance*) dan kemampuan guru untuk berinovasi dengan ide-ide baru dan mengintegrasikannya dalam praktik, selalu hadir di sekolah, setia kepada sekolah dan yang lebih penting dari itu adalah kemampuan untuk memberikan pengaruh yang tinggi untuk kemajuan peserta didik dan sekolah (Swarnalatha, 2016). Guru yang berkomitmen berupaya untuk mencapai keberhasilan sekolah dan mereka terikat secara emosional dengan karir mereka (Ngussa & Gabriel, 2017).

Guru yang berkomitmen mengembangkan pengetahuan, sikap yang diinginkan dan keterampilan yang dibutuhkan (Jane & Kumar, 2017). Beberapa guru melihat komitmen mereka sebagai bagian dari identitas profesional mereka sehingga mereka mendapatkan banyak kenikmatan dari komitmen tersebut. Namun guru lainnya merasa bahwa komitmen sebagai guru membutuhkan investasi pribadi yang besar dan melihatnya sebagai pekerjaan yang berat sehingga merasakan berat dalam menjalani komitmen tersebut (Jane & Kumar, 2017).

Komitmen guru adalah keterikatan emosional seorang guru dengan sekolah dimana ia bekerja sehingga ia bersedia bertahan, mengidentifikasi diri dan terlibat untuk mencapai tujuan sekolah (Hidayat, 2017b). Terdapat beberapa jenis komitmen yang terkait dengan guru yaitu: komitmen profesi, komitmen pada anak didik dan komitmen pada masyarakat (Hussen & Teshome, 2016). Bentuk komitmen guru terdiri dari: *personal goal*, yaitu guru memiliki komitmen untuk menjadi yang terbaik, *capacity belief*, yaitu percaya akan kemampuan pada diri sendiri, *context belief*, yaitu kemampuan guru untuk mendayagunakan sumber-sumber belajar secara efektif dan efisien, dan *emotional arousal process*, yaitu kemampuan untuk siap melaksanakan tugas dalam keadaan apapun (Yu, Leithwood, & Jantzi, 2002).

Komitmen guru terkait juga dengan komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah keterikatan emosi karyawan untuk mengidentifikasi dan terlibat di dalam organisasi (McShane dan Von Glinow, 2010). Stroch et al. (2002) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan proses yang terus berlangsung dimana para karyawan mengekspresikan perhatian untuk kesuksesan organisasi tempat mereka bekerja.

Berdasarkan kajian konsep dan teori di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen guru adalah ekspresi dan upaya guru dalam waktu yang terus menerus dalam memajukan peserta didik dan sekolah dengan indicator: (1) Menjaga kepercayaan orang tua pada sekolah; (2) Memantau perkembangan dan kemajuan peserta didik; (3) Berupaya hadir di sekolah; (4) Berupaya hadir tepat waktu; (5) Merasa bangga dengan sekolah; (6) Menjaga nama baik melalui sikap dan perilaku; (7) Membantu kemajuan akademik sekolah; (8) Menjaga iklim yang kondusif di sekolah; (9) Berkomitmen untuk menjadi guru yang baik; (10) Memberi materi pelajaran yang berguna bagi peserta didik; (11) Memperlakukan peserta didik sebagai seorang yang unik dan berharga; (12) Berusaha menjadi guru profesional.

C. Manajemen Kurikulum Pendidikan

1. Pengertian Kurikulum

Secara etimologis istilah "*curriculum*" berasal dari bahasa Latin yang semula digunakan dalam bidang olahraga, yaitu *curro* atau *currere* yang berarti "*reecourse*" (lapangan/pacuan kuda, jarak tempuh lari, perlombaan, pacuan balapan, peredaran, gerak berkeliling, lapangan perlombaan, gelanggang, kereta balap, dan lain-lain (Sanjaya, 2008). Hidayat (2016) menyatakan secara konseptual menurut Schubert sebagaimana dikutip oleh Rahmat Hidayat, Schubert berpandangan terhadap kurikulum cukup beragam, yaitu bahwa: (1) kurikulum sebagai isi mata pelajaran (*curriculum as content or subyect matter*); (2) kurikulum sebagai sebuah program aktivitas yang direncanakan (*curriculum as program of planned activity*); (3) kurikulum sebagai hasil belajar (*curriculum as intended learning outcomes*); (4) kurikulum sebagai reproduksi budaya (*curriculum as cultural reproduction*); (5) kurikulum sebagai suatu yang dialami siswa (*curriculum as experience*); (6) kurikulum sebagai sebuah tugas dan konsep-konsep khusus (*curriculum as distrectret and concepts*); (7) kurikulum sebagai sebuah agenda untuk rekonstruksi sosial kemasyarakatan (*curriculum as an agenda for social reconstruction*); dan (8) kurikulum sebagai sesuatu yang harus dijalani oleh siswa (*curriculum as currere*).

Maka dengan demikian, kurikulum adalah rencana program pengajaran atau pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang akan diberikan kepada anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ibaratkan orang yang akan membangun rumah, kurikulum adalah blue print (gambar cetak

birunya). Kurikulum atau program pendidikan inilah sebenarnya ditawarkan atau dijual oleh suatu lembaga pendidikan kepada masyarakat.

2. Pengertian Manajemen Kurikulum

Istilah manajemen kurikulum berasal dari dua kata, yaitu “manajemen” dan “kurikulum”. Kurikulum adalah semua kegiatan, pengalaman, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian anak, baik yang terjadi di sekolah, halaman sekolah, atau di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah agar peserta didik dapat menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Rusman (2009) menyebutkan manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian pada tujuan kurikulum.

Nurdin (2002) mengartikan manajemen kurikulum sebagai suatu proses mengarahkan agar kegiatan proses pembelajaran berjalan dengan baik sebagai tolak ukur pencapaian tujuan dari pengajaran oleh pendidik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa aktivitas manajemen kurikulum ini merupakan kolaborasi antara kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah beserta peran guru dalam melakukan kegiatan manajerial agar perencanaan berlangsung dengan baik. Dari definisi manajemen kurikulum di atas, dapat dipahami bahwa manajemen kurikulum merupakan sebuah proses kerjasama dalam mengelola kurikulum untuk mencapai tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan secara efisien dan efektif.

3. Ruang Lingkup Manajemen Kurikulum

Rusman (2009) Mengemukakan manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari KTSP dan MBS. Lingkup manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Pada KTSP lebih mengutamakan untuk merealisasikan dan merelevansikan antara kurikulum nasional (standar kompetensi/kompetensi dasar) dengan kebutuhan daerah dan kondisi sekolah yang bersangkutan, sehingga kurikulum tersebut merupakan kurikulum yang integritas dengan peserta didik maupun dengan lingkungan di mana sekolah itu berada.

Menurut Azhari (2017) ruang lingkup manajemen kurikulum terdiri dari beberapa bagian, yaitu: (a) manajemen perencanaan dan pengembangan kurikulum; (b) manajemen pelaksanaan kurikulum; (c) supervisi pelaksanaan kurikulum; (d) pemantauan dan penilaian kurikulum; (e) perbaikan kurikulum; (f) desentralisasi dan sentralisasi pengembangan kurikulum; (g) masalah ketenagaan dalam pengembangan kurikulum serta model-model kepemimpinan yang serasi pada konteks masyarakat yang berkembang dinamis dewasa ini.

4. Tujuan Kurikulum

Kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan sendiri adalah sesuatu yang abstrak, ruwet (rumit), dan kompleks yang dibedakan beberapa terminologi yang

berhubungan dengan tujuan, yaitu: (1) aims, yaitu suatu tujuan yang akan dicapai dengan relatif waktu yang cukup lama. Misalnya Tujuan Pendidikan Nasional; (2) objective, yaitu suatu tujuan yang berupa bagian dari aims yang diprogramkan secara bulat. Misalnya Tujuan Institusional (tujuan lembaga); (3) goal, yaitu bagian tujuan dari objective yang berupa bagianbagian yang diprogramkan secara utuh. Misalnya Tujuan Instruksional Umum atau mata pelajaran; (4) target, yaitu sasaran tujuan pendidikan yang berupa berbagai pokok-pokok permasalahan. Misalnya Tujuan Instruksional Khusus, sasarannya adalah tujuan pokok bahasan atau tujuan sub pokok bahasan (Dakir, 2004)

5. Komponen Kurikulum

a. Hakekat *Higher Order Thinking Skills*

Kurikulum 2013 yang diberlakukan saat ini mengalami penyempurnaan pada standar isi dan standar penilaian. Pada standar isi dirancang agar peserta didik mampu berfikir kritis dan analitis sesuai standar internasional dengan melakukan pengurangan materi yang tidak relevan dan pendalaman serta perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. Sedangkan pada standar penilaian dilakukan dengan mengadaptasi model-model penilaian standar internasional secara bertahap. Penilaian hasil belajar lebih menitikberatkan pada kemampuan berfikir tinggi (*Higher Order Thinking Skills*).

Majid (2014) menyebutkan *Higher Order Thinking Skills* atau disebut dengan HOTS menurut Ibrahim dalam Majid merupakan suatu konsep reformasi pendidikan berbasis taksonomi hasil belajar (Taksonomi Bloom). Ide ini menyatakan bahwa beberapa tipe belajar memerlukan lebih banyak proses kognitif dari pada yang lainnya. Anderson dan Krathwohl (Majid, 2014) berpendapat bahwa proses berfikir itu dinamis, sehingga harus dinyatakan menggunakan kata kerja dan perlu melakukan revisi terhadap taksonomi tersebut. Saran lain adalah adanya perubahan dimensi dari proses berfikir menjadi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Untuk dimensi pengetahuan tersebut mereka memperkenalkan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif untuk setiap level proses berfikir. Dimensi proses berfikir dalam Taksonomi Bloom yang telah disempurnakan oleh Anderson dan Krathwohl terdiri atas kemampuan mengetahui (*knowing-C1*), memahami (*understanding-C2*), menerapkan (*applying-C3*), menganalisis (*analyzing-C4*), mengevaluasi (*evaluating-C5*), dan mengkreasi (*creating-C6*).

Dari semua aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merdeka belajar hakikatnya memberikan solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Keberadaan merdeka belajar memberikan terobosan baru dalam melakukan inovasi pembelajaran yang lebih bermutu serta adaptif terhadap perubahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merdeka belajar sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan dapat melalui proses pembelajaran, komitmen guru, peranan kepemimpinan kepala sekolah serta manajemen kurikulum pendidikan dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu yang mampu menghadapi berbagai tantangan serta kebutuhan sesuai dengan tuntutan dan perubahan zaman, teknologi, maupun perubahan kehidupan, maka pendidikan diharapkan berjalan dengan terarah, tersusun, terencana dan berkelanjutan agar mewujudkan generasi lulusan terbaik dengan kualitas pendidikan yang terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Astutik, Pipit P. (2017). Integrasi PKK dan HOTS dalam Pembelajaran Tematik SD. *Jurnal FIP UM*.
- Azhari, Muhammad. (2017). Manajemen Kurikulum dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Analytica Islamica*. Vol. 6 No. 2.
- Bashori, B. (2016). Manajemen Perubahan Kurikulum KTSP 2006 ke-Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Kediri. *Jurnal LPPM*, 4(2), 94–106.
- Bashori, B. (2017a). *Penerapan Model Pembelajaran Artikulasi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Al-Qur'an Hadits (Studi Pada Siswa Kelas VII B di MTs Thamrin Yahya Rambah Hilir)*.
- Bashori, B. (2017b). Penerapan Strategi Reading Aloud Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas Viii C Pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadis di Mts Thamrin Yahya Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, Riau. *Hikmah*, 67–75.
- Bashori, B. (2017c). Strategi Kompetitif Dalam Lembaga Pendidikan. *Tadris*.
- Baro'ah, S. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Tawadhu*, 4(1), 1063-1073.
- Bamalli, H.S. (2013). Competencies and Strategies for the Teaching of 21st Century Learners in Vocational Home Economics Education. *Journal of Educational and Social Research*, 3 (9) : 105-108
- Chen, H.L.S., & Huang H.Y. (2017). Advancing 21st Century Competencies in Taiwan. National Taiwan Normal University: 1-21.
- Daryanto. (2009). *Panduan Proses Pembelajaran Kreatif dan Inovatif*. Jakarta: AV Publisher.
- Dakir. (2004). *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Evelin Siregar & Hartini Nara. (2010). Teori Belajar dan Pembelajaran. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2020). Konsep Merdeka Belajar Pendidikan Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Progresivisme Konstruktivisme, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 12 (2): 155-164
- Fitrah, M. (2017). “Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan”. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(1) hlm. 36.
- Hendra, Suwardana. 2017. Revolusi Industri 4. 0 Berbasis Revolusi Mental, *Jati Unik*, 1(2): 102-110.
- Heryati. (2010). Model Inovatif Pembelajaran Bahasa Indonesia. Jakarta: Multi Kreasi Satu Delapan.
- Hidayat, Rahmat. (2016). *Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam*. Medan: LPPPI
- Hussen, A. A., & Teshome, T. Z. (2016). Teachers Professional Commitment Towards Students Learning , Their Profession and The Community In Eastern Ethiopian Secondary Schools. *Journal Of Teacher Education And Educators*, 5(3), 289–314
- H.M. Hasbullah. (2015). Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia). Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Jane, J. S. A. M., & Kumar, S. P. (2017). Teacher Commitment and Student Achievement In Chemistry At Higher Secondary Level. *International Journal of Current Research and Modern Education (IJCRME)*, 2(1), 37–40
- Kumar, R. (2011). *Research Methodology A Step-By-Step Guide For Beginners* (3rd Edition). California: SAGE Publications Asia-Pacific Pte Ltd. Retrieved.
- Majid, Abdul. (2014). *Pembelajaran Tematik Terpadu*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyasa. 2010. *Menjadi Guru Profesional (Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan)*. Bandung Rosda. Cetakan Kesembilan.
- Mualifah, I. 2013. Progresivisme John Dewey dan Pendidikan Partisipatif Perspektif Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 01 (01): 102-121.

- Mustaghfiro, Siti. 2020. Merdeka Belajar Perspektif Aliran Progresivisme John Dewey. *Jurnal Edureligia* 4, 1: 3-5
- Nata, Abuddin. (2009). *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Nurdin, Syafruddin. (2002). *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Ciputat Press.
- Ngussa, B. M., & Gabriel, L. (2017). Participation in Decision Making and Teachers "Commitment : A Comparative Study between Public and Private Secondary Schools in Arusha Municipality, Tanzania. *American Journal of Educational Research*, 5(7), 801– 807.
- Risnita, R., & Bashori, B. (2020). The Effects of Essay Tests and Learning Methods on Students' Chemistry Learning Outcomes. *Journal of Turkish Science Education*, 17(3), 332–341. <https://doi.org/10.36681/tused.2020.30>
- Ramayulis. 2012. Metodologi pendidikan agama islam. Jakarta: Kalam Mulia.
- Prasetyo, M. A. M., Bashori, B., & Novi Nur Lailisna. (2020). Strategy of Boarding School (Pesantren) Education in Dealing With the Covid-19 Pandemic. *Kholifa: Journal of Islamic Education*, 4(2), 142–160.
- Rusman. (2009). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saiful sagala. (2004). *Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*. Jakarta: Rakasta Samasta.
- Suarga, Efektivitas Penerapan Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Peningkatan Mutu Layanan Administrasi Pendidikan, (*Jurnal Idaroh*, Vol. I, No. 1. Juni 2017), hlm. 29-31.
- Suyahman, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Gratis di Sekolah Menengah', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6 (2016), 1047-1054 .
- Swarnalatha, S. S. (2016). Work Commitment of Secondary School Teachers. *The International Journal of Indian Psychology*, 3(4), 85.
- Wina Sanjaya *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2008.